



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG
KETERTIBAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA
RIAU POS PURWODADI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Serjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH :

ROBBIATTUL ADDAWIYAH
NIM. 11720424708

**PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah”** yang ditulis oleh :

Nama : Robbiattul Addawiyah
 Nim : 11720424708
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.
 NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA RIAU POS PURWODADI"**

Yang ditulis oleh:

Nama : ROBBIATTUL ADDAWIYAH
 NIM : 11720424708
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 22 September 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Eulkipli M.Ag

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROBBIATTUL ADDAWIYAH
 NIM : 11720424708
 Tempat, Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 Februari 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PANJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS
 SATUAN POLISI RAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
 DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002
 TENTANG KETERTIBAN UMUM PEDABANG KAKI LIMA
 RIAU POS PURWODADI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 NOVEMBER 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM: 11720424708

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Robbiattul Addawiyah (2021):

ABSTRAK

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi

Penelitian ini dilatar belakangi banyak Pedagang Kaki Lima di Purwodadi Riau Pos yang tidak menaati aturan dilarangnya berjualan di trotoar jalan yang mana menimbulkan kemacetan dan kerusakan lingkungan, hal ini perlu adanya peran Satpol PP dalam mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Penertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukan untuk ketertiban umum dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam membina dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak bolehkan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Tugas Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi), 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Satuan Pamong Praja kota Pekanbaru dalam penertiban umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi), 3) Bagaimana Tugas Satuan Pamong Praja kota Pekanbaru dalam penertiban Umum pedagang kaki lima berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan yang dimana berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Data Primer yang didapat dari pihak Satpol PP Kota Pekanbaru. Data Sekunder nya adalah data yang didapat dari Pedagang Kaki Lima, buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui observasi, wawancara di lapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah berdasarkan nash al-quran, hadist dan kaidah fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarek.

Jadi, dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa tugas Satpol PP sudah sangat baik dalam menertibkan pedagang kaki lima. Karena mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Tugas Satpol PP Dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain Faktor Individu, Faktor Kepemimpinan, Faktor Sistem dan Faktor Kontekstual. Satpol PP sudah berperan sesuai dengan *fiqh siyasah* karena tugas dan fungsi dari Satpol PP sejalan dengan *ulil amri* dan lembaga *Wilayatul al-Hisbah* dan Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, tugas dan fungsi Satpol PP sudah sangat sesuai dan sejalan dengan konsep *ulil amri* dan *Wilayatul al-Hisbah*.

Kata Kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita yang penuh kebodohan kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis Lanturkan kepada kedua Orang tua dan keluarga tercinta saya, ayahanda (Abdul Rahman) dan Ibunda (Enita) yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan saya , sekaligus yang selalu memberikan dukungan moril dan spiritual kepada saya, semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam keadaan sehat, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, serta adek perempuan saya (Zalfa Rahman) dan adek laki-laki saya (Muhammad Ozil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rahman) dan sekaligus seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, kritikan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakin Dekan I, Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan, dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini, dan selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Nurlaili, Dra., M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syria'ah dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada Bapak / Ibu Dosen serta pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai referensi penulis.
9. Terimakasih kepada Andikawirawan yang selalu membantu penulis dalam masalah yang berhubungan dengan perkuliahan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga niat baik kita dipermudah oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada Septi Piola, Mashita Nur Rohimah dan Mardiani Harahap yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta memberi motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Nurdiantari Febrianti yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan selalu memberikan support kepada penulis
12. Serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) baik senior maupun junior yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.



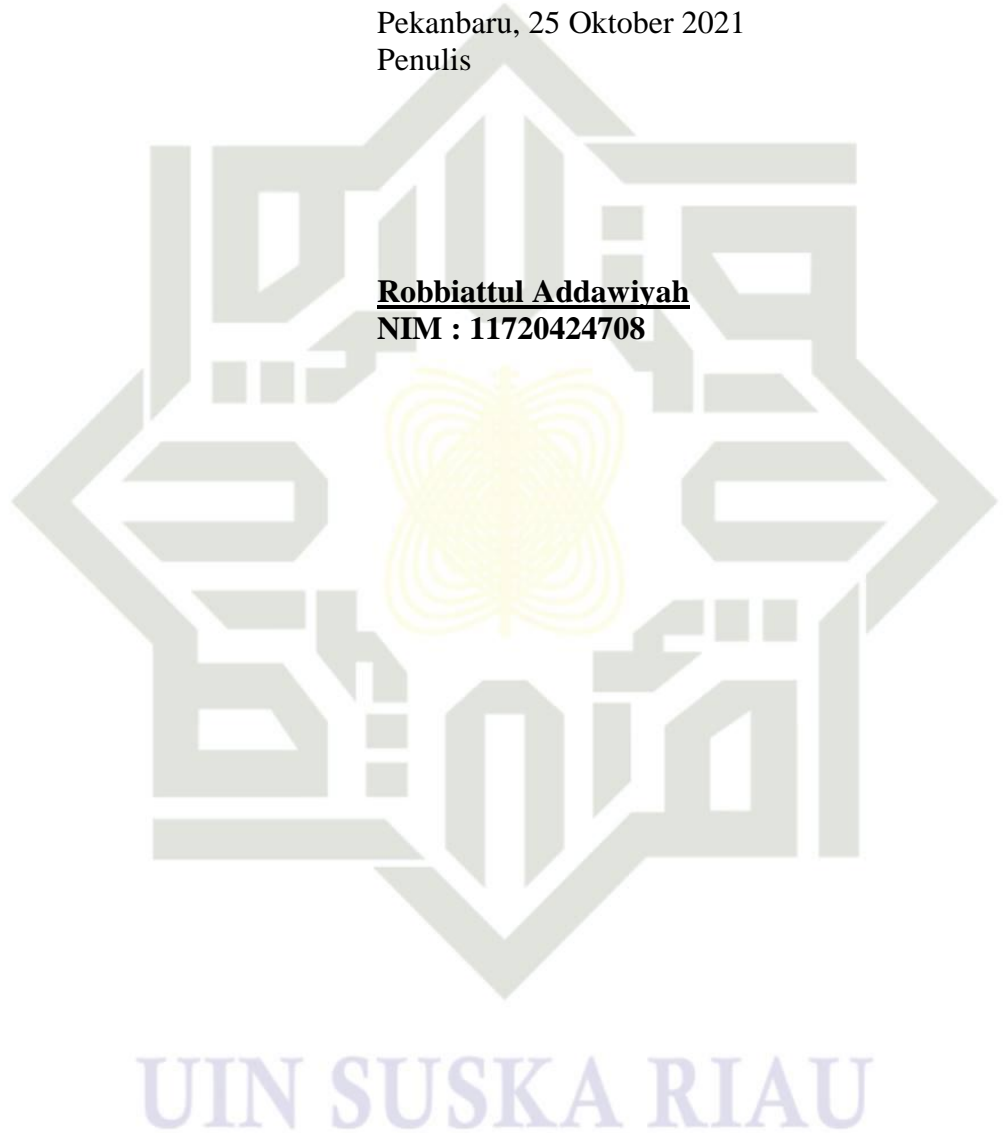
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis hanya berdoa semoga apa-apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang sangat berguna dan akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. *Amin*

Pekanbaru, 25 Oktober 2021
Penulis

Robbiattul Addawiyah
NIM : 11720424708





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
A. Sejarah Singkat Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ..	18
B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ..	20
C. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ...	21
D. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	21
E. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	22
F. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru	23
G. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	28
H. Struktur Organisasi SATPOL PP	31
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pelaksanaan atau Implementasi	32
B. Pengertian Tugas dan Fungsi	33
C. Pengertian Ketertiban Umum	35
D. Pedagang Kaki Lima	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Ketertiban Umum Perda Nomor 5 Tahun 2002	57
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	74
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Perda Nomor 5 Tahun 2002	75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

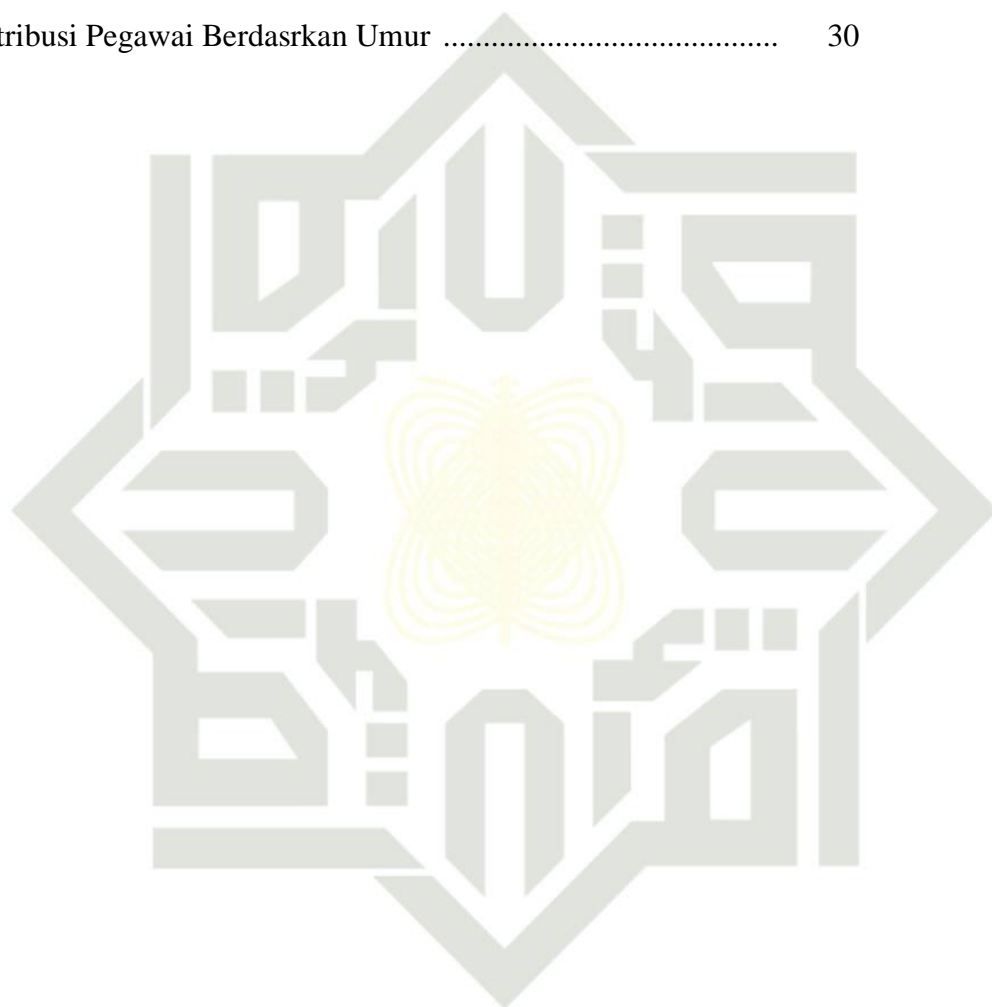
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	28
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan	29
Tabel 2.3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 2.4	Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur	30



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan petunjuk kehidupan umat Islam dalam segala urusannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Di dalam al-Qur'an juga terdapat berbagai hukum yang telah di tentukan oleh Allah SWT. demi kemaslahatan umat. Meskipun tidak adanya penjelasan secara detail mengenai politik, namun ada ayat yang mengupasnya demi terciptanya keadilan, baik yang berkaitan dengan khilafah, wilayah, dan sebagainya.¹

Berdasarkan hakikatnya, siyasah syar'iyah bersumber pokok dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Di mana keduanya menjadi acuan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kemaslahatan. Di masa saat ini banyaknya muncul persoalan-persoalan dinamis yang terbatas penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sama halnya dengan permasalahan politik, di mana permasalahan politik tidak ada ditemui di dalam al-Qur'an dengan detail, tetapi tersirat di dalam penjabaran permasalahan lain, seperti permasalahan mengenai *khilafah* (sistem pemerintahan). Maka dari itu untuk menciptakan perundang-undangan yang menjadi acuannya bisa terdapat pada manusia dan lingkungannya.

Dewasa ini seiring dengan perkembangan konteks, *ulil amri* biasa di maknai sebagai seseorang atau lembaga yang mempunyai otoriter dalam menyelesaikan sebuah persoalan, dan tentu masih mengacu kepada Al-Qur'an

¹ Miftahur Rahman, "Ulil Al-Amr dalam Al-Qur'an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed", Jurnal Studi Ilmi-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Vol.16 No.2, 2017, hlm 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan as-Sunnah.² *Ulil amri* bertugas melayani keperluan banyak orang, memiliki tanggung jawab yang berat, dan memberikan bantuan kepada masyarakat. *Ulil amri* akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (*authority dan power*), berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan.³

Dari uraian di atas, bahwasannya dalam konteks fiqih siyasah yang membuat ataupun menerapkan tugas dan berperan dalam pencapaian kemaslahatan umat ialah *ulil amri* (pemimpin) berdasarkan kewenangan dan kekuasaannya. Adapun Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Farid Abdul Khaliq, mendefenisikan *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, *Syaikh Mahmud Shaltut* berkata : bahwa *Ulil Amri* adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁴

Ulil amri dapat dikaitkan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang ada ataupun membuat peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Kepala daerah dapat di bantu oleh bagian teknis operasional daerah dalam menjalankan tugas, salah satunya seperti dalam aspek penataan dan pembinaan yang di bantu oleh teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja daerah.

² Toto Tohir, "*Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA*", Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.18 No.3, 2002, hlm 19

³ *Ibid*, hlm.272

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), cet. Ke-1, hlm 83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasulnya (as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁵ [Q.S. An-Nisa : 59]

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. telah menjelaskan, bahwasannya kita wajib untuk menaati *ulil amri* (pemimpin) serta kebijakannya yang berlandaskan kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. dan Rasulnya. Maka dari itu apa yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* harus kita hormati dan patuhi demi terciptanya kemaslahatan. *Ulil amri* juga harus dapat di percaya dan tidak menyalahi perintah Allah SWT.

Pada zaman modern saat ini, untuk membuat atau mengesahkan suatu peraturan pemerintah di butuhkan aturan yang bersifat tertulis. Hukum tertulis yaitu merupakan hukum yang menjadi faktor utama dalam melakukan suatu dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hukum yang tertulis ini dapat kita lihat di dalam suatu Hirarki suatu Perundang-undangan, baik itu dari undanng- undang sampai tingkat yang paling bawah yaitu Peraturan Daerah.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Grafindo, 2009, Hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maka dari itu hal ini sesuai dengan pasal 2 TAP MPR No. III / MPR / 2000. Namun itu untuk di sebuah daerah baik Kabupaten maupun Kota dapat membuat aturan sendiri yang dianggap memang dibutuhkan untuk mengatur daerah tersebut. Peraturan yang buat oleh Eksekutif daerah DPRD dapat berupa Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda.⁶

Peraturan Daerah ini yaitu merupakan salah satu alat penguasa suatu pemerintah untuk bertindak agar segala tindakannya mempunyai dasar hukum atau legalitas, sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan sah dimata hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga tindakan pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus berdasarkan pada hukum.

Maka dari itu Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat dengan adanya Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru

Salah satu pusat keramaian yang mendatangkan berbagai masalah dan keluhan dari masyarakat adalah sebuah pasar tradisional. Dimana pasar menjadi hunian pencari nafkah dibidang perdagangan. Pedagang adalah orang yang berkerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk meraih

⁶Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta : Karya Gemilang, 2008) Cet. Ke-2, hlm 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

keuntungan.⁷ Maka dari itu dengan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas dengan pasal 1 Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang maupun sejenisnya dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Pedagang kaki lima ini merupakan salah satu usaha masyarakat disektor perdagangan yang perlu dikendalikan agar terjaganya ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat. Kehadiran PKL menimbulkan persoalan baik masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan maupun kebersihan. Banyaknya persoalan yang menyangkut PKL merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah salah satunya ketidak nyamanan karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat⁸

Adapun Pedagang Kaki Lima ini adalah, sebagai pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atau trotoar yang berukuran lebar kurang dari lima kaki (1,5 meter), dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian dan umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung bioskop dan lain-lain.⁹

Dalam melakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru ini berawal dari misi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah, baik dari masalah kenyamanan

⁷N Faradina, "Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima (<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/16276/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>) Diakses tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 11:32

⁸ Peraturan Daerah Pekanbaru No.5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima,

⁹ Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Lumian Offset, 2003) hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut termasuk pedagang kaki lima tidak dibenarkan menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan ketertiban dan keindahan kota menjadi terganggu dan tidak enak untuk dipandang. Namun dalam prakteknya terdapat bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pelanggaran dan penyimpangan itu berbentuk penataan tempat berjualan sampai pada badan jalan, trotoar dan lain sebagainya sehingga mengganggu ketertiban umum. Sementara menurut peraturan yang berlaku yakni pasal 3 ayat (1) Perda ini menyebutkan: “setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.”¹⁰

Selain itu dalam Perda ini hanya mengatakan bagaimana cara Penataan dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima. Namun seorang Pedagang Kaki Lima adalah bagian dari subjek hukum atau yang menjalankan hukum atau aturan. Adapun yang menyangkut tindakan apa saja yang dilarang dapat dilihat dalam Perda Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 yaitu tentang Ketertiban Umum. Yang mana untuk lebih jelasnya sistematika tindakan yang menyangkut tentang Ketertiban Umum dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu adanya untuk tertib jalan, jalur hijau taman dan tempat umum, dan tertib keamanan lingkungan. Maka dari itu berdasarkan isi Perda No. 5 Tahun 2002 pada pasal 6 huruf b yang sudah di jelaskan di atas menyatakan: “dilarang untuk membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak

¹⁰ Pemko Pekanbaru, *op. Cit.*, hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.¹¹

Untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan seperti yang diterangkan sebelumnya, maka diperlukan pengawasan yang ketat . Kalau perlu diberikan tindakan tegas terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu pada Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima. Dengan harapan hal itu akan dapat mewujudkan ketertiban dan keindahan serta kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.¹²

Pengaturan tempat usaha ini dapat dilihat pada pasal 2 Perda No. 11 Tahun 2001 yakni:

1. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pada pasal ini mengandung arti bahwa tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang telah ditetapkan dan mendapat izin dari Walikota Pekanbaru yang Pedagang Kaki Lima itu sendiri tidak bisa menentukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apabila Pedagang Kaki Lima itu tidak menempati sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka Pedagang Kaki Lima itu dapat dikatakan telah menyalahi aturan. Selain itu

¹¹ Pemko Pekanbaru, *Perda Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2002*, (Pekanbaru: Pemerintah kota Pekanbaru, 2007)

¹² <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+realisasi+perda+no.11+tahun+2001>, Di akses pada hari Sabtu Tanggal 6 Februari 2021, Pukul 12.51 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Juga Pedagang Kaki Lima dapat berjualan harus mendapat izin Tempat Usaha dari Walikota. Tanpa adanya izin maka Pedagang Kaki Lima tersebut adalah illegal atau tidak sah.¹³

Di sisi lain dalam Perda No. 5 Tahun 2002 yaitu dalam pasal 19 ayat (1) menyatakan “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk”. Dalam Perda ini dijelaskan tentang kewajiban Pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima.

Maka dari itu untuk membantu kepala daerah, dalam urusan penegakan peraturan daerah menjadi tugas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pasal 255 ayat (1) yang berbunyi “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.¹⁴

Untuk mengoptimalkannya dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)¹⁵ dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan peraturan tersebut bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.

¹³ Pemko Pekanbaru, *Perda Kota Pekanbaru* No. 5 Tahun 2002, op. Cit., hlm 3-4

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 255 ayat

¹⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2018 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini tentu menjadi tugas dan peran khusus bagi SATPOL PP sebagai perangkat daerah dibidang penegakan hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk segera melaksanakan dan menegakkan perda yang telah ditetapkan.¹⁶

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di Pasar Jongkok jalan Purwodadi kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan, bahwasannya penulis masih menemukan gejala-gejala yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukan masyarakat yang berjualan disekitar lingkungan Purwodadi yang semakin banyak atau semakin meningkat di pinggir jalan.
2. Masih ditemukan masyarakat disekitaran Purwodadi yang berjualan di trotoar jalan tanpa mengikuti aturan yang telah diatur oleh pemerintah mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima
3. Masih ditemukan masyarakat yang tidak taat dan mengikuti aturan dalam berjualan sehingga menyebabkan pengusuran masyarakat yang berjualan oleh Satpol PP

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi”**.

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Thun 2008, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam Petertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi), serta Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum kaki lima di Riau Pos (Purwodadi) berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi)?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi)?
3. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polis Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah.?

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau pos Purwodadi.
- b. Untuk mengetahui kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Penertiban Umum.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Penertiban Umum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.
- 3) Untuk salah satu syarat meraih gelar serjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Secara Akademis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologi hukum yang mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil penelitian tersebut karena lokasinya murah dijangkau oleh penulis.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di Riau Pos Purwodadi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, khusus-khusus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 380 orang dari keseluruhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁸ Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan 1 orang bagian kabid Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan 2 orang lagi bagian dari pihak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam. Selanjutnya untuk populasi dari pihak para pedagang kaki lima Riau Pos Purwodadi dari keseluruhan sekitar 20 orang jadi dari jumlah keseluruhan tersebut peneliti mengambil 5 orang pedagang kaki lima Riau Pos Purwodadi. Teknik pengambilan

¹⁸ Bambang Suggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), Hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel yang digunakan adalah probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak/random yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

5. Sumber Data

- a. Datalam Primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan pihak pedagang kaki lima Riau Pos Purwodadi.
- b. Data Skunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹
- c. Data Tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan skunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan,²⁰
- b. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam

¹⁹ Ibid, hlm 60

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindso Persada, 2004, hlm 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terbuka yang diperoleh 4 orang pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan 5 orang para pedagang kaki lima Riau Pos Purwodadi.

- c. Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil lapangan dan keterangan secara tertulis, tergambar, terekam atau tercetak.²¹

7. Teknik Analisa Data

Analisa Data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu mengidentifikasi secara sistemis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian.²²

Yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.

8. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang

²¹ Satori, Djaman dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2011, hlm 5

²² Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Ciputaat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak dan sebagainya.

- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu cara Analisa dan kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Teknik deduktif itu sendiri digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.²³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memutar latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tinjauan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang terdiri dari visi dan misi, kedudukan , tugas dan fungsi, wewenang, organisasi, kepala satuan pamong praja sub bagian tata usaha, seksi penyidik, seksi operasional,

²³ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 250



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seksi pembinaan kapisitas, pegawai Satpol PP, struktur organisai Satuan Polisi Pamon Praja Kota Pekanbaru.

BAB III : Merupakan tinjauan teoritis yang berisikan uraian tinjauan tentang defenisi pelaksanaan, tugas, ketertiban umum, pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja, perauran daerah, dan peraturan daerah no. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, tentang fiqih siyasah, ruang lingkup fiqih siyasah, sumber-sumber fiqih siyasah, fiqih siyasah dusturiyah, konsep kekuasaan dalam sistem dusturiyah.

BAB IV : Berisikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi.

BAB V : Merupakan penutup, pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Sejarah Singkat Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.²⁴

Polisi Pamong Praja di dirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu di bentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di

²⁴ Data Dari Kantor Satpol PP Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak di berlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan di gantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.²⁵

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No.34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun

²⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru²⁶

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, normasosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

²⁶ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

C. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru²⁷

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

D. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

²⁷ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

E. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru²⁸

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur /badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

²⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

F. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru²⁹

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

²⁹ *Ibid.*

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pamong Praja³⁰

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah.
- b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah.
- d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya.
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas.
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Tata Usaha

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan

³⁰ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil³¹

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota.
- b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS
- e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Operasional³²

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:³³

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.

³³ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru³⁴

Tabel 2.1
Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	10 orang	5,1%
2.	SLTP	10 orang	5,1%
3.	SLTA	50 orang	25,5%
4.	Diploma 3	20 orang	10,1%
5.	S1	280 orang	50,5%
6.	S2	10 orang	5,15%
7.	S3	-	-
	Jumlah	380	100%

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagian besar berpendidikan formal lulusan S1 dimana terdapat sebanyak 280 orang pegawai atau mencapai sekitar 50,5% dari jumlah keseluruhan pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat

³⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

disimpulkan bahwa setiap pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan tugasnya masing – masing dengan cukup baik karena latar belakang tingkat pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.³⁵

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Tingkat lowongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	10 orang	5,1%
2.	Golongan III	30 orang	10,2%
3.	Golongan II	50 orang	25,5%
4.	Golongan I	15 orang	10%
5.	PTT	275 orang	50,2%
	Jumlah	380	100%

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berpangkat PTT (Honorar) dengan jumlah sebanyak 275 orang atau sekitar 50,2% dari keseluruhan pegawai yang ada. Dengan demikian diketahui bahwa dalam menyelesaikan tugasnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikategorikan baik.

Tabel 2.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	330 orang	85,7%
2.	Perempuan	50 orang	14,3%
	Jumlah	380	100%

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021³⁶

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 330 orang atau 85,7% dari jumlah pegawai keseluruhan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di lapangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai perempuan

Tabel 2.4
Distribusi Pegawai Berdasrkan Umur

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1.	20 – 29 Tahun	220	45,1%
2.	30 – 39 Tahun	110	25,5%
3.	40 – 49 Tahun	30	15,2%
4.	50 – 59 Tahun	20	10,2%
	Jumlah	380	100%

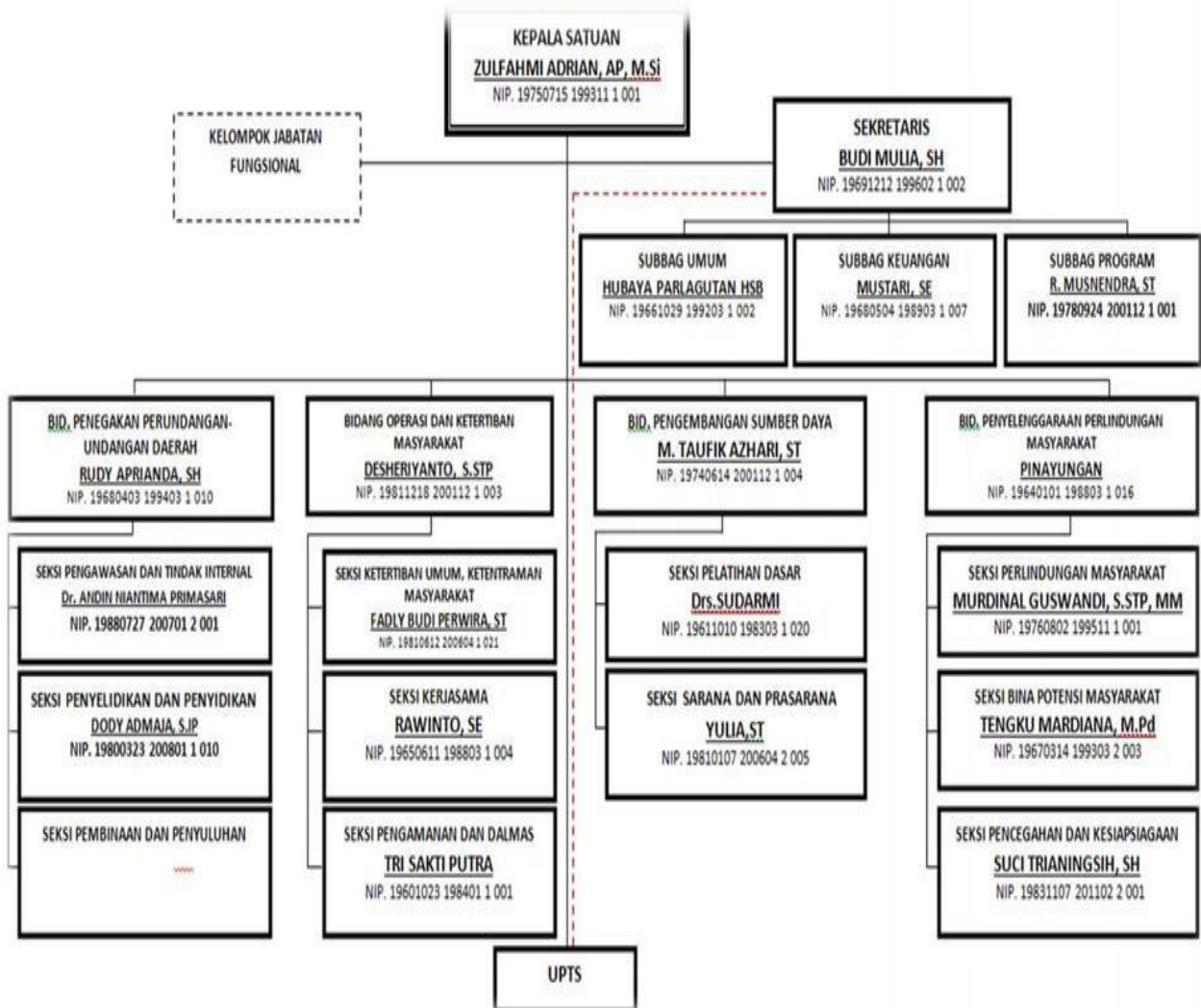
Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berusia rata-rata 20-29 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 20-29 tahun sebanyak 220 orang atau sekitar 45,1% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada usia kerja produktif sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya.



H. Struktur Organisasi SATPOL PP³⁷

Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA PEKANBARU



³⁷ Ibid.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pelaksanaan atau Implementasi

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang /berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita /tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar³⁸ Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn³⁹ mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky⁴⁰ mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

³⁸ Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Press (2008), hlm 68

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press (2003), hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digunakan sebagai berikut:

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

B. Pengertian Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

1. Pengertian Tugas

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder⁴¹ tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu

⁴¹ Moekijat, *Analisis Jabatan*, Bandung: Mandar Maju (1998). hlm, 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan. Sementara Stone⁴² mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencaapai suatu tujuan tertentu.

Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner⁴³ menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

2. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, defenisi yang menurut The Liang Gie,⁴⁴ fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.⁴⁵ Defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut Moekijat, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

⁴² *Ibid, hlm 10*

⁴³ *Ibid, hlm 10*

⁴⁴ Zainal, Ningning Haslinda, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. Makassar: Fisipol (2008)

⁴⁵ *Ibid*

C. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, anatara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penfasiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.⁴⁶ Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar /bertentangan dengan ketrtiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketrtiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sduah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁴⁷ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi

⁴⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 56

⁴⁷ Ibid, M, Yahya Harahap, hal 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai dengan undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Maka dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor 30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan.

Undang-Undang Nomor 30/1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat. Jika seorang dianggap melanggar maka seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan social”⁴⁸ jadi maksud dari UUUD 1945 tersebut adalah

⁴⁸ UUD 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Daftar Pedagog Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

PKL ialah pedagang yang dikategorikan sebagai salah satu jenis pekerjaan yang cukup penting serta relatif, khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah PKL sendiri mengacu pada konotasi para pedagang yang cara berdagangnya dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang menurut mereka strategis. Terdapat pula segolongana pedagang yang berdagang dengan memaka gerobak dorong dan kios-kios kecil. Oleh sebab itu, menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai PKL

Latar belakang seseorang menjadi PKL menurut Alisjahbana adalah karena ;

1. Terpaksa: sebab tidak ada pekerjaan lain, terpaksa disebabkan tak mendapat pekerjaan di fektor formal, sehingga terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup serta keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, juga terpaksa sebab tak memiliki pendidikan dan modal yang cukup untum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka usaha formal;

2. Ingin mendapat rejeki yang halal daripada hanya menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
3. Ingin bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
4. Ingin menghidupi keluarga serta memperbaiki taraf kehidupan, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan;
5. Sebab di desa sangat sulit mencari penghasilan⁴⁹

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: “Para PKL⁵⁰ yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya ialah golongan dari masyarakat yang tergolong marginal serta tak berdaya. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari kerasnya arus kehidupan kota serta ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sementara⁵¹ dikatakan tidak berdaya, sebab mereka biasanya tak terjangkau dan tak terlindungi oleh hukum, tawar dan menawarnya pun lemah, serta sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota oleh aparat yang bertugas.

Istilah PKL juga terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL bahwa PKL adalah pelaku usaha yang

⁴⁹ Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2006), hlm. 147

⁵⁰ Soetandoyo, Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. (Surabaya: Bayumedia Surabaya, 2008), hlm. 91

⁵¹ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun usaha tidak bergerak. Menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan parkir dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang sifatnya tidak menetap/sementara.

PKL ialah istilah untuk menyebut orang yang berdagang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian sebab jumlah kaki dari pedagangnyanya ada lima. Lima kaki tersebut berasal dari dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya ialah tiga atau dua roda dan satu kaki).⁵² Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk para pedagang yang berdagang di jalanan.

Sebenarnya istilah kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwasanya setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pejalan kaki. Lebar ruas jalan pun ialah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak digunakan oleh para pedagang untuk berjualan. Dulu namanya ialah pedagang emperan jalan, namun sekarang jadi pedagang kaki lima. Padahal kalau melihat sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

2. Faktor faktor berkembangnya pedagang kaki lima

PKL tentu ada di setiap penjuru daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan PKL pun sudah ada sejak puluhan tahun lamanya. Ada

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, diakses pada 20 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa faktor penyebab muncul dan juga berkembangnya para PKL disetiap kota besar, yaitu ;

- a. Kurang luasnya lapangan pekerjaan, populasi manusia terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Akan tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak banyak. Hal ini membuat banyak orang yang menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan Kemudian mereka akhirnya memilih untuk berdagang dan menjadi PKL Modalnya relatif kecil dan tidak membutuhkan persyaratan seperti di perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan.
- b. Sulitnya ekonomi, keadaan krisis ekonomi yang sempat menimpa di tahun 1988 mengakibatkan runtuhnya sektor ekonomi formal sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada sektor industri kota. Hal ini membuat mereka memilih sektor informal untuk tetap bertahan hidup.
- c. Peluang, disamping faktor diatas, kemunculan PKL justru disebabkan adanya peluang yang cukup yang besar. Hal ini dikarenakan menjadi seorang PKL tidak membutuhkan modal yang besar. Tidak perlu menyewa tempat usaha dan bisa dikerjakan sendiri. Selain itu, keuntungan yang didapat pun cukup menggiurkan. Pada sisi lain, banyaknya perilaku konsumtif dari masyarakat tentu menjadi peluang untuk menyediakan segala kebutuhan mereka.
- d. Urbanisasi, arus migrasi dari desa ke kota yang terus meningkat menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam setiap kegiatan-kegiatan

penduduk kota di Indonesia tidak seluruhnya tergolong dalam kelompok pendapatan tinggi. Justru tergolong dalam pendapatan rendah dan juga menengah. Dapat dikatakan daya beli dari sebagian besar penduduk yang ada di kota masih termasuk rendah, sehingga permintaan terhadap jasa-jasa yang relatif murah harganya semakin meningkat.⁵³

3. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana telah disebutkan mengenai pengertian dan juga faktor yang mengakibatkan berkembangnya PKL serta penertiban PKL ada didalam.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 1.
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

E. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi

⁵³ Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Diatas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002". (Skripsi Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), hlm. 50-51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁵⁴ Peraturan daerah adalah salah satu bentuk Realisasi sebenarnya adalah otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya peraturan daerah sudah benar. Perundang-undangan yang lebih tinggi, melalui observasi Setiap wilayah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁵⁵

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁵⁶

⁵⁴ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007) Hlm. 202

⁵⁵ Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM universitas bandung. 1995), h. 8

⁵⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung cet. Ke-1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.⁵⁷ Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan

Rancangan peraturan daerah yang telah mencapai kesepakatan tentang: Diskusikan dan laporkan ke walikota oleh sekretaris distrik. Disertai dengan catatan pengantar dari pimpinan DPRD kepada walikota. berurusan dengan Pembahasan dilakukan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. sebelum Diskusikan di DPRD sebelum penjadwalan Komite Peninjau DPRD. Pembahasan di ruang lingkup DPRD sangat padat. Ini untuk kepentingan politik semua faksi. Tim kerja yang dilembagakan Legislasi diimplementasikan oleh panitia (A to D). Proses diskusi dimulai dengan Rapat paripurna DPRD dan kegiatan interpretasi walikota. lanjut Pandangan umum semua pihak dalam rapat paripurna DPRD. Langkah selanjutnya adalah Pembahasan panitia, panitia gabungan atau panitia

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal 1 ayat (7)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus (pansus). Dalam pembahasan, jika DPRD menganggap perlu, bisa diselesaikan Bandingkan penelitian dengan daerah lain yang memiliki peraturan daerah yang sama Diskusikan substansi rancangan peraturan daerah. Dengan kondisi Proses diskusi dirasa sudah cukup, baru diambil keputusan Di rapat paripurna DPRD, barulah komentar terakhir Nilai: Penyampaian rancangan peraturan daerah Selambat-lambatnya tujuh (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan Ketentuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Ini dilakukan oleh penanggung jawab area dengan tanda tangan Selambat-lambatnya 30 hari sejak draf regulasi daerah itu.

2. Mekanisme proses Perda

Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- b. Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- c. Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- d. Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemenelemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- f. Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untukmendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.⁵⁸

3. Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Tanggung jawab dan wewenang Pemerintahan Daerahyang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 dan 2.Kepala Daerah memiliki Tugas :

Ayat 1

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perdan tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

⁵⁸ Srijanti & A. Rahman. *Etika Berwarga Negara*. (ed.2). (Jakarta: Salemba Empat, 2008). Hlm 106-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29 Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Kepala Daerah Berwenang :

Ayat 2

- a. Mengajukan Rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah yang tertulis dalam Pasal 66 ayat 1, dan 2. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

Ayat 1

- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur;
- d. Memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati / walikota;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat 2

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimkasud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”

Setelah melihat tanggung jawab pemerintah Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Tentu kita bisa melihat dengan jelas seperti apa sistem pemerintahan itu Setiap wilayah memiliki aturan permainannya sendiri Lakukan hal yang sama seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala daerah dan wakil kepala daerah Hal tersebut menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga sama pentingnya Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus mendapat perhatian khusus, 31 Mengingat sebagai lembaga legislatif, DPRD harus menjalin kerjasama yang baik Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah bertindak sebagai kepala eksekutif daerah.

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*ideader Waarheid*).⁵⁹ dan cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idée der zedelijkheid*). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 5 mengamanatkan

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh-oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”

Pasal 18 ayat 5 ini kemudian diperkuat lagi dengan ayat 6 yaitu,

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat

⁵⁹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2009), h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pemerintahannya masing-masing. Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD.⁶⁰ Dalam proses sinkronisasi eksekutif dan legislatif dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD harus bersatu guna mengembangkan perangkat hukum yang sehat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bercita-cita. Menurut Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001 Tata cara terkait dalam Perpres No. ini adalah merumuskan peraturan daerah yaitu peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan instruksi gubernur / bupati / walikota.⁶¹ DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, karena dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan secara yuridis persetujuan itu sendiri mempunyai makna kewenangan menentukan, karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada Peraturan Daerah.⁶²

Sumber hukum dapat dibedakan kedalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Menurut Utrecht (1983: 84-85), sumber hukum materiil adalah perasan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum yang menjadi penentu isi hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah yang menjadi penentu formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum.

⁶⁰ Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Perda Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai dengan Manual*. (Jakarta, Prenada Media grup, 2010). H. 50.

⁶¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001

⁶² Abdul Latif, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Suatu Kajian Normatif)*, (Ujung Pandang, 1997), hlm 102

F. Peraturan Daerah Ketertiban Umum Nomor 5 Tahun 2002

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukan untuk menertibkan dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam menertibkan dan mengawasi para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak dibolehkan. Dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima, Adapun Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru menurut Pasal 6 huruf (a) dan (b) Perda No. 2 Tahun 2002 dalam hal ketertiban umum Pedagang

Kaki Lima adalah sebagai berikut:

Dilarang

- (a) Dilarang berada di jalur hijau, taman dan tempat umum atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga-bunga atau tanamannya.
- (b) Dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan.

Kemudian mengenai tempat tertib usaha untuk Pedagang Kaki Lima semua telah diatur di dalam Perda No: 5 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) yaitu :

Ayat (1) Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota stau pejabat yang ditunjuk.

G. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara Etimologis, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis *Fiqh* adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.⁶³

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyasah* adalah *Siyasah* berarti tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁶⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.⁶⁵

⁶³ Muja'r Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008). hlm 2.

⁶⁴ Muja'r Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Ibid*. hlm. 9.

⁶⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi di atas *Fiqh Siyasah*, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalannya.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)⁶⁶

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata Internasional da hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan.⁶⁷

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

3. Sumber-Sumber Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi

⁶⁷ Ibid. hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁶⁸

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'adah*, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*.⁶⁹

Dengan metode ini umat Islam boleh menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash AlQur'an dan Hadis Nabi.

H. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 16

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁷⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷¹

A.Jazuli menjelaskan ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Ibid.* hlm. 177-178

⁷¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Kencana, 2003), hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

- a. bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliya al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah-masalah peradilan.
- d. bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁷²

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara.

⁷² H.A.. Djauli *Ibid*, hlm. 48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait upaya Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP sudah sangat baik dalam menertibkan pedagang kaki lima. Karena mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hanya saja mereka kurang tegas dalam menindak para pedagang dengan alasan kemanusiaan. Dalam Peraturan Daerah pun sudah sangat jelas menyebutkan bahwa seseorang dilarang berdagang dijalan hijau, lahan parkir, trotoar dan bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan para pejalan kaki dan pengguna jalan lain (pengendara kendaraan).
2. Peran Satpol PP Dalam Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain Faktor Individu, Faktor Kepemimpinan, Faktor Sistem dan Faktor Kontekstual.
3. Satpol PP sudah berperan sesuai dengan *fiqh siyasah* karena tugas dan fungsi dari Satpol PP sejalan dengan *ulil amri* dan lembaga *Wilayatul al-Hisbah* dan Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, tugas dan fungsi Satpol PP sudah sangat sesuai dan sejalan dengan konsep *ulil amri* dan *Wilayatul al-Hisbah*.



B. Saran

Berikut ini saran penulis mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meringankan biaya lapak atau toko untuk para Pedagang Kaki Lima yang ingin berjualan agar sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan dan agar tidak berjualan lagi ditempat yang tidak seharusnya.
2. Diharapkan kepada Satpol PP agar dalam menjalankan tugasnya yaitu lebih tegas lagi dengan memakai aturan yang membuat jera para pedagang adar tidak berjualan di sembarang tempat lagi dan juga tidak memakai kekerasan fisik.
3. Diharapkan kepada para Pedagang Kaki Lima untuk menaati aturan yang sudah ada yang mana tidak dibolehkannya berjualan disekitar tro toar jalan karena merusak lingkungan dan kemacetan jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdijazuli, 2003. *Fiqh Siyasah*, Bandung : Kencana
- Abdul Latif, 1997. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Suatu Kajian Normatif)*, Ujung Pandang
- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Press
- Akshahbana, 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS Press
- Bakir Manan, 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM universitas bandung
- Bintardi Dwi Laksono, 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Diatas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002". (Skripsi Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)
- Bambang Sunggono, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Burhan Bugin, 2011. *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, cet, ke-1
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Depdikbud, RI, 1989. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Desi Tamara, Skripsi: 20019 "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar tengah tanjung karang kota bandar lampung", (Lampung: Raden Intan Lampung.
- Diwaini Dimayudin. 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar.
- Gusti Ramanda Rahma, 20018, Skripsi, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung", Lampung: UIN Raden Intan
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yogyakarta: Lukman Offset,

Hikmat, 2012. *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-1
Indonesia Legal Center Publishing, 2008 *Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta : Karya Gemilang, Cet. Ke-2

Irwani Suhartono, 1995. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. Ke-3

Ivancevich, John, M, dkk, 2008. *Prilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta : Erlangga

J. Suyuti Pulungan, 1997. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

John Echols, 1998. *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta, Gramedia, Edisi ke-3, Cet ke- 6

Jusuf Soewadji, 2012 *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001
Lexy j. Moleong, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. Ke-7

M. Ali Hasan. 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-undangan cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius

Mathis Robert, Jakson John, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Salemba Empat

Menghujana, 1991. *Pembinaan Arti Dari Metodenya*, Yogyakarta : Kanisius
Mietah Thoha, 2005. *Dimensi-Dimensi prima ilmu Administrasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Miftahur Rahman, 2017 “*Ulil Al-Amr dalam Al-Qur’an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed*”, Jurnal Studi Ilmi-Ilmu Al-Qur’an dan Hadits, Vol.16 No.2

Muhammad Iqbal, 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Har, Ibnu Syarif, Khamami Zada, 2008. *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Meekijat, 1998, *Analisis Jabatan*, Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, 2013. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nuridin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin, 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press
- Pemko Pekanbaru, 2001. *Perda Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001*, (Pekanbaru : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
- Pemko Pekanbaru, 2007. *Perda Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2002*, Pekanbaru: Pemerintah kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 *Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL*, Pasal 1 ayat (1).
- Peter, Salim, 1991. *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, Edisi Pertama
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Santoso s, 1995. *Pembinaan Arti Dari Metodenya*, Jakarta : Kanisius
- Sayyid Sabiq, 1989, *Fiqh Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki*, Bandung: Almarif
- Sophtandoyo, Wignjosoebroto, 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Surabaya: Bayumedia Surabaya
- Srianti & A. Rahman, 2008. *Etika Berwarga Negara*. (ed.2). (Jakarta: Salemba Empat
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cet. Ke-3
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet, cet. Ke-1
- Susiadi AS, 2015 *Metode Penelitian*, Lampung, Bandar Lampung:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LP2M institute Agama Islam Negeri Raden Intan, cet, ke-1

Syamsir, 2014. *Torang, Organisasi & Manajemen Prilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta

Toto Tohir, 2002 “*Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA*”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.18 No.3

Undang-Undang No. 16 Tahun 2018 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal 1 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 255 ayat (1)*

Widjaja, 2000. *Pembinaan Arti Dari Metodenya*, Yogyakarta : Kanisius
Yulianti, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Grafindo Persada

Zainal, Ningning Haslinda, 2008., *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar: Fisipol.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, diakses pada 20 Agustus 2019

<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>. Diakses 26 Februari 2021, WIB. 01.56

S,ahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 22:21 WIB.

N Faradina, 2020 “*Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima*”
(<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16276/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>) Diakses tanggal 19 Agustus, Pukul 11:32

Wawancara

Chandra, (Kabid OP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru), wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Tanggal 29 Maret 2021

Mhammad Fardamsyah (Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru), wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Tanggal 29 Maret 2021

(Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas untuk turun kelapangan), wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Tanggal 29 Maret 2021

Rendi Ramadhan P. (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas untuk turun kelapangan), wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Tanggal 29 Maret 2021

Desianti, (Pedagang Pakaian Pria) wawancara dengan penulis, Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi Pekanbaru, Tanggal 26 Maret 2021.

Deji, (Pedagang Pakaian dan Celana Pria) wawancara dengan penulis, Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi Pekanbaru, Tanggal 26 Maret 2021

Evi, (Pedagang Jilbab) wawancara dengan penulis, Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi Pekanbaru, Tanggal 26 Maret 2021

Gibran, (Pedagang Kaos Kaki) wawancara dengan penulis, Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi Pekanbaru, Tanggal 26 Maret 2021.

Ramlan, (Pedagang Peci atau Kopiah) wawancara dengan penulis, Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi Pekanbaru, Tanggal 26 Maret 2021



PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN

A. Pihak Satuan Pamong Praja

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja sudah pernah melakukan Penertiban Umum kepada Pedagang Kaki Lima sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Apakah sanksi yang Pamong Praja Berikan Kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan ketertiban berjualan ?
3. Apa sudah ada dilakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima agar para pedagang tertib dan teratur.
4. Berapa kali Satuan Pamong Praja dalam mengadakan penertiban Pedagang Kaki Lima ?
5. Apakah sudah ada penyediaan tempat khusus untuk para Pedagang Kaki Lima bagi yang harus pindah untuk berjualan kembali ?

B. Pihak Pedagang Kaki Lima

1. Apakah bapak / ibu sebelumnya sudah tau aturan atau tata tertib untuk berjualan di sekitaran jalan Purwodadi ini ?
2. Apa yang membuat bapak / ibu ingin berjualan di sekitaran lingkungan jalan Purwodadi ini ?
3. Apakah bapak / ibu sebelumnya sudah pernah kenak tegur atau tertangkap razia satpol PP di tempat ibu berjualan saat ini ?
4. Apakah bapak / ibu sudah memintak izin kepada pihak yang berwajib untuk berjualan di pasar ini ?
5. Berapa rata-rata pendapatan bapak / ibu berjualan di pasar ini perharinya ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Ke Kantor Satpol PP Pekanbaru



Wawancara dengan Bapak Muhammad Fardamsyah, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Bapak Chandra, Kabid OP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Rezi Ramadhan P. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas untuk turun kelapangan.



Wawancara dengan Bapak Poni W. Anggota Satuan Polisi. Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas untuk turun kelapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama dengan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang turun ke lapangan

2. Wawancara Ke Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi



Wawancara dengan Bapak Gibran (Umur 26 Tahun). Pedagang Kaki Lima Raiu Pos Purwodadi, Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Desianti (Umur 49 Tahun). Pedagang Kaki Lima Raiu Pos Purwodadi, Pekanbaru.



Wawancara dengan Bapak Dodi (Umur 28 Tahun). Pedagang Kaki Lima Raiu Pos Purwodadi, Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Evi (Umur 42 Tahun). Pedagang Kaki Lima Raiu
Pos Purwodadi, Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM PEDAGANG KAKI LIM RIAU POS PURWODADI”**,

Yang ditulis oleh:

Nama : ROBBIATTUL ADDAWIYAH
NIM : 11720424708
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

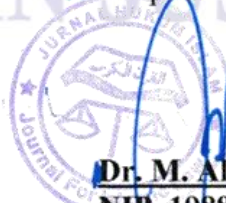
Nama : ROBBIATTUL ADDAWIYAH
NIM : 11720424708
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA RIAU POS PURWODADI

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 1 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/595/2021

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38792 tanggal 17 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

: **ROBBITATUL ADDAWIYAH**
: 11720424708
: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
: HUKUM TATA NEGARA
: S1
: JL. TAMAN KARYA KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN-PEKANBARU
: PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
: DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
: BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001
: MANURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS PEDAGANG
: KAKI LIMA RIAU POS PURWODADI KELURAHAN SIDOMULYO
: BARAT KECAMATAN TAMPAN)
: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Nama :
NIM :
Fakultas :
Jurusan :
Jenjang :
Alamat :
Judul Penelitian :

Lokasi Penelitian :

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Menimbang :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of the University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/3130/2021

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Irfan Zulfiqar, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ROBBIATTUL ADDAWIYAH
NIM : 11720424708
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mclp
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
b. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
c. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38792
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Um.0417.11/PP.00.9/6617/2021 Tanggal 18 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ROBBIATTUL ADDAWIYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11720424708 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN SATUAN PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA RIAU POS PURWODADI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PEDAGANG KAKI LIMA RIAU POS PURWODADI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

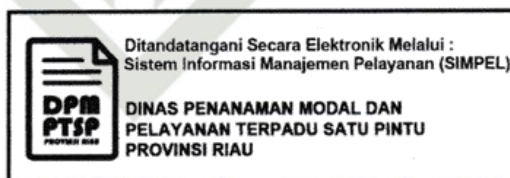
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Februari 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Sudirman Telepon 31543 - 38765
PEKANBARU - 28126



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/ 349/2021

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/595/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ROBBITATUL ADDAWIYAH**
NIM : 11720424708
Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
Jurusan : **S.1 HUKUM TATA NEGARA**

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA RIAU POS PURWODADI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN)”

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/ Penelitian ini keluar agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

an. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU
SEKRETARIS**



MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH
Pembina Tk.I NIP. 19640711 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ROBBIATTUL ADDAWIYAH Lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 1999. Anak Pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Abdu Rahman dan Ibunda Ernita. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah SDN 041 Tampan lulus pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjutkan pendidikan di Mts Al-Huda lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Al-Huda lulus pada tahun 2017. Setelah dinyatakan lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi”**. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi penulis, hingga akhirnya pada tanggal 22 September 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan dinyatakan **“LULUS”** serta berkah mendapatkan gelar Serjana Hukum (SH).